

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, karena wilayah di Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi, kabupaten/kota dan daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang dilakukan haruslah mampu menyentuh hingga masyarakat kecil. Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan penting di dalam pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000: 10).

Menurut Purwanti (2009) keberhasilan pembangunan dapat dinilai melalui seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru maka akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke sektor industri atau jasa dan perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011: 9-11).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang turut serta di dalam melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakatnya. Dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh sebesar 6,30% pada tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,26% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari Tabel 1.1 di halaman berikut ini dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa, meskipun begitu jika dibandingkan dengan angka nasional pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2014 masih sedikit di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Baru pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibanding provinsi lainnya di Pulau Jawa, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17 persen. Berikut ini merupakan tabel perbandingan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa tahun 2010-2018.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa,**  
**Tahun 2010-2018**

Provinsi	(%)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DIY	4,88	5,21	5,37	5,50	5,20	4,95	5,05	5,26	6,30
Jawa Tengah	6,44	5,30	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28	5,32	5,28
Jawa Timur	7,06	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,62	5,45	5,50
Jawa Barat	6,09	6,50	6,50	6,06	5,09	5,03	5,76	5,29	5,58
DKI Jakarta	6,51	6,73	6,53	6,11	5,95	5,11	5,88	6,22	6,17
Banten	6,08	7,03	6,83	6,67	5,47	5,37	5,13	5,71	5,81
Indonesia	6,22	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020). Data diolah

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) dalam teori pertumbuhan, bahwa setiap wilayah harus melihat dan mengetahui sektor atau komoditi apa yang dimiliki serta yang dapat dikembangkan, baik potensi alam maupun sektor yang memiliki *competitive advantage* (keunggulan kompetitif). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong terjadinya *multiplier effect* (efek ganda) sehingga membantu sektor lain berkembang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut ini merupakan data persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018.

Tabel 1.2

**Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018**

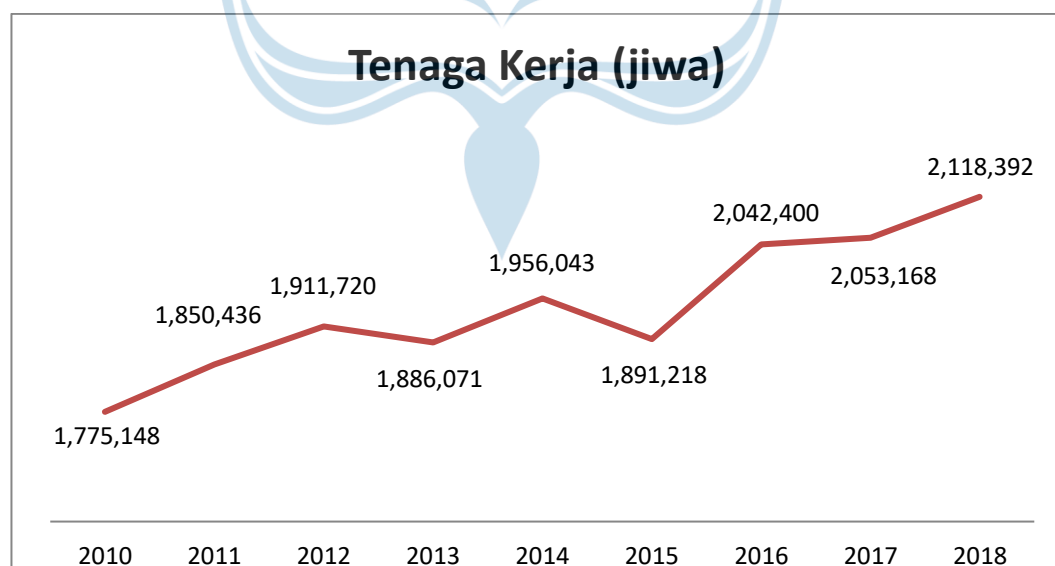
No.	Lapangan Usaha	PDRB (juta rupiah)	Tenaga Kerja (jiwa)
1	Pertanian	37.271,88	432.057
2	Pertambangan dan Penggalian	886,56	18.772
3	Industri Pengolahan	3.394.676,56	346.919
4	Pengadaan Listrik dan Gas	62.198,73	6.028
5	Pengadaan Air	36.154,65	5.283
6	Konstruksi	1.982.260,91	160.636
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	1.845.136,02	393.305
8	Pengangkutan dan Pergudangan	987.436,19	76.344
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.127.938,79	207.788
10	Informasi dan Komunikasi	3.704.297,56	16.217
11	Jasa Keuangan	1.564.443,22	34.382
12	Real Estate	2.388.465,93	1.956
13	Jasa Perusahaan	320.469,47	49.970
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	2.328.916,20	73.888
15	Jasa Pendidikan	2.572.770,81	118.129
16	Jasa Kesehatan	1.035.716,81	36.184
17	Jasa-jasa Lainnya	738.176,84	141.534

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta (2020). Data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor informasi dan komunikasi menyumbang terhadap total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3.704.297,56 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya pada tahun 2018. Dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjumlah 432.057 jiwa dan diikuti sektor perdagangan dan reparasi mobil dan motor yang berjumlah 393.305 jiwa.

Menurut Hartono *et al.* (2018), apabila PDRB mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Hal ini dikarenakan peran penting dari tenaga kerja terhadap kenaikan output produksi di mana semakin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk proses produksi akan meningkatkan nilai output produksi.

Penyerapan tenaga kerja secara umum memperlihatkan besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan dalam menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2003: 69). Berikut ini merupakan data penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta (2020). Data diolah.

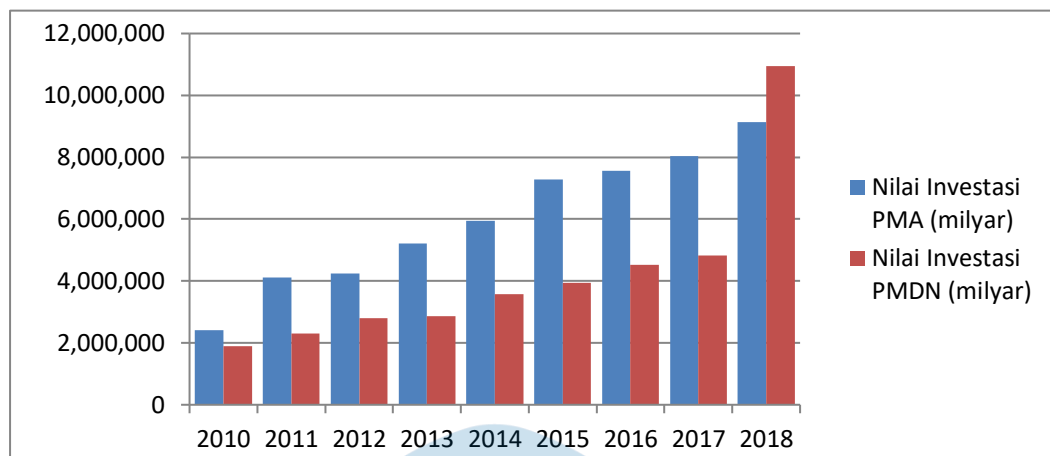
**Gambar 1.1**

**Jumlah Penduduk yang Bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2018**

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010-2015 penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dan penurunan. Baru pada tahun 2016 penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2018 dan tidak pernah mengalami penurunan.

Secara tidak langsung penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh investasi, baik investasi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam perekonomian (Sukirno, 2012: 121).

Menurut Dimas dan Woyanti (2009), investasi dapat memberikan kontribusi yang besar di dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut ini merupakan nilai investasi PMA dan PMDN di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2018.

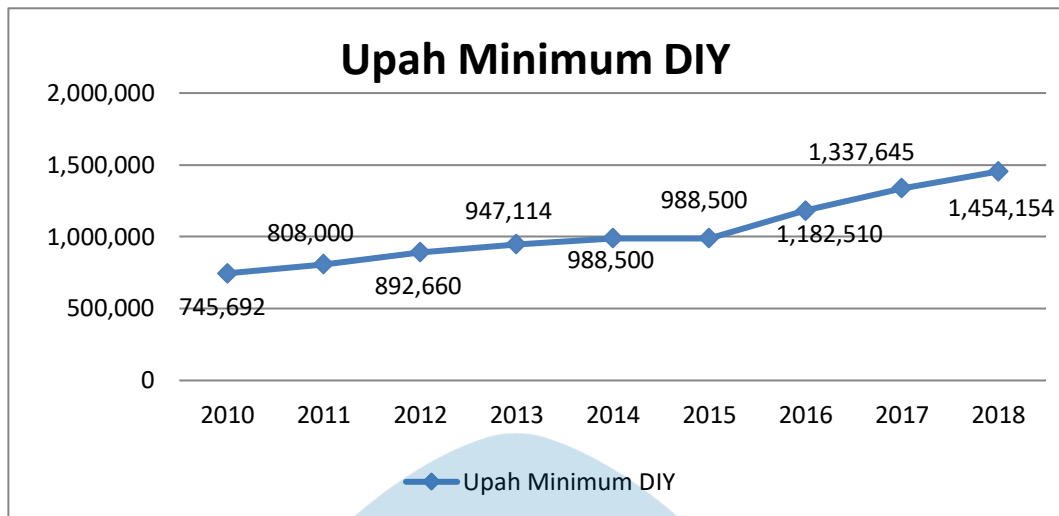


Sumber: DPPM DIY (2020). Data diolah.

**Gambar 1.2**  
**Nilai Total Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Investasi**  
**Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Daerah Istimewa**  
**Yogyakarta Tahun 2010-2018.**

Berdasarkan data pada Gambar 1.2 di atas, investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan, baik PMA maupun PMDN. Dari tahun 2010 hingga tahun 2017 nilai PMA selalu lebih tinggi dibandingkan PMDN. Sebaliknya pada tahun 2018 nilai PMDN mengalami peningkatan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari nilai investasi penanaman modal asing (PMA).

Menurut Simanjuntak (2005), faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka akan mempengaruhi biaya produksi. Oleh karena itu, untuk melakukan efisiensi, perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja sehingga mengakibatkan kesempatan kerja menjadi lebih kecil atau rendah. Berikut ini merupakan upah minimum di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta (2020). Data diolah.

### Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2018

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Haryo Kuncoro (2002), apabila harga upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dibandingkan input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lainnya yang lebih murah sehingga dapat mempertahankan keuntungan yang maksimal.

Penyerapan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu perlu diketahui apakah faktor-faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Regional berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh PMA terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dilampirkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PMA terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu referensi dan bahan di dalam kebijakan pembangunan serta gambaran terkait penyerapan tenaga kerja

## 2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui pengaruh PDRB, PMA, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.

### 1.5 Hipotesis

Berdasarkan pada studi terkait di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.
2. Diduga bahwa PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.
3. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdapat teori-teori tentang permintaan, penawaran dan penyerapan tenaga kerja, landasan teori dan studi atau riset terdahulu yang terkait dengan penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini membahas mengenai data, sumber data,

dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### BAB IV

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi analisis hasil penelitian dan interpretasi dari hasil yang telah diuji.

#### BAB V

#### PENUTUP

Pada bagian ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

